



Analisis Efisiensi dan Akurasi Penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dalam Penyaluran Gaji Induk yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPPN Bandung II

Juju Nuryanti^{1*}, Fithri Dzikrayah²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: jujuny36@gmail.com¹, fithridzikrayah@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jalan Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: jujuny36@gmail.com *

Abstract. *The aim of this research is to analyze the accuracy and efficiency of the Centralized KPPN Salary Application in managing state finances, especially in terms of main salary distribution. This research uses a qualitative descriptive method with primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of documentation. The research results show that this application is able to increase efficiency through automation processes, reduce manual intervention, and speed up data reconciliation. Accuracy is also increased with an automatic validation system that ensures accuracy in calculating and recording salaries. Compared to manual mechanism, this application is able to reduce the potential for errors, speed up data processing, and optimize electronic document management.*

Keywords: *Efficiency, Accuracy, Centralized KPPN Salary Application, Information System, Payroll*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akurasi dan efisiensi Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penyaluran gaji induk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi melalui proses otomatisasi, mengurangi intervensi manual, serta mempercepat rekonsiliasi data. Akurasi juga meningkat dengan adanya sistem validasi otomatis yang memastikan ketepatan dalam perhitungan dan pencatatan gaji. Dibandingkan dengan sistem manual, aplikasi ini mampu mengurangi potensi kesalahan, mempercepat pemrosesan data, serta mengoptimalkan pengelolaan dokumen secara elektronik.

Kata kunci: Efisiensi, Akurasi, Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, Sistem Informasi, Penggajian

1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi dan digitalisasi saat ini menuntut pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien dan akurat. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik, pemerintah diharuskan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam operasi administratif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengembangan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat yang bertujuan untuk membuat proses penyaluran gaji lebih mudah dan lebih otomatis. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II bertugas mengelola keuangan negara, termasuk penyaluran gaji langsung ke rekening Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui bank umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016, gaji induk, Tunjangan Hari Raya (THR), kekurangan gaji, gaji susulan, dan gaji terusan adalah beberapa jenis gaji yang ditangani oleh KPPN.

Proses pengelolaan gaji yang sebelumnya dilakukan secara manual seringkali membutuhkan waktu yang lama dan rawan kesalahan, baik dalam perhitungan maupun pencatatan data. Deby Novalia Gultom (2024) menyatakan bahwa digitalisasi pada sistem keuangan dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional. Pandangan ini didukung oleh Anisyah (2024), yang menyoroti bahwa penerapan sistem terintegrasi berperan penting dalam meminimalkan kesalahan manusia serta meningkatkan ketepatan data. Penelitian yang dilakukan oleh Rini & Junita (2024) mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan menyatakan bahwa teknologi secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi dalam pelaporan keuangan, peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga telah mengurangi kesalahan manual. Kemudian penelitian Deasy, Rahman & Sulsaman (2024) mengenai Efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi gaji sudah cukup efektif dalam pengelolaan gaji ASN. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hilda & Agus (2024) tentang evaluasi pemberlakuan sistem keuangan tingkat instansi dalam rangka mendukung pertanggungjawaban di satuan kerja membuktikan bahwa aplikasi efektif dalam mendukung akuntansi pemerintahan di Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri.

Namun demikian, meskipun secara teoritis sistem informasi berbasis aplikasi seperti Aplikasi Gaji KPPN Terpusat diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterlambatan pengajuan dokumen oleh satuan kerja yang menyebabkan keterlambatan pencairan gaji. Selain itu, pengelolaan pengaduan pegawai yang belum optimal melalui sistem layanan digital turut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dan realita implementasi di instansi pelaksana. Kesenjangan ini menjadi dasar penting untuk diteliti lebih lanjut agar sistem aplikasi tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan layanan keuangan yang efisien dan akurat.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana akurasi data yang dikelola melalui Aplikasi Gaji KPPN Terpusat? (2) Bagaimana perbandingan penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dengan sistem manual sebelumnya? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Aplikasi Gaji KPPN Terpusat mampu mendukung efisiensi dan akurasi dalam penyaluran gaji induk yang bersumber dari APBN, serta menyajikan rekomendasi yang relevan bagi KPPN Bandung II.

Penelitian ini menjadi relevan karena masih terbatasnya studi yang secara khusus mengkaji efisiensi dan akurasi penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dalam penyaluran gaji induk yang bersumber dari APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan pegawai KPPN Bandung II serta pihak terkait yang terlibat dalam proses penyaluran gaji menggunakan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dan penyaluran gaji induk.

2. KAJIAN TEORITIS

A. EFISIENSI

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diartikan sebagai ketepatan dalam melakukan suatu tindakan serta kemampuan menyelesaikan tugas secara benar dan akurat tanpa menghabiskan banyak biaya, waktu, atau tenaga. Menurut Syam (2020), efisiensi merupakan indikator keberhasilan suatu aktivitas yang dinilai dari jumlah sumber daya yang dipakai untuk mencapai hasil tertentu. Sebuah kegiatan dapat disebut efisien apabila terjadi peningkatan dalam prosesnya, seperti menjadi lebih cepat atau lebih hemat biaya. Sedangkan menurut Stoner (2010), efisiensi merujuk pada kemampuan dalam menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Individu yang bekerja secara efisien mampu mengurangi pengeluaran sumber daya yang dibutuhkan. Indikator efisiensi yaitu 1) waktu proses yang cepat, tingkat kesalahan data (Atmaja et al., 2018). Efisiensi kerja berarti menjalankan tugas dengan cara yang paling sederhana, biaya yang paling rendah, waktu yang paling singkat, beban yang paling ringan, dan jarak yang paling dekat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memperoleh hasil tertentu. Semakin kecil penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang ditargetkan, maka proses tersebut dianggap semakin efisien. Secara umum, efisiensi berarti upaya untuk mencapai hasil terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik bahan maupun tenaga kerja, dalam waktu yang sesingkat mungkin.

B. AKURASI

Akurasi data adalah ukuran sejauh mana data yang dikumpulkan dan dianalisis mencerminkan nilai atau informasi yang sebenarnya. Menurut Kirk (2020), akurasi data didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara nilai yang diukur dan nilai sebenarnya yang diharapkan, di mana akurasi mencakup ketepatan pengukuran dan keandalan data yang digunakan untuk analisis. Sedangkan menurut Internasional Standar Organization 5725-1 (2023) menambahkan bahwa akurasi data mencakup dua aspek utama, yaitu ketepatan (*precision*) dan kebenaran (*trueness*), di mana ketepatan merujuk pada konsistensi data dalam pengukuran, sedangkan kebenaran berkaitan dengan seberapa dekat data tersebut dengan nilai sebenarnya. Secara umum, akurasi data berhubungan erat dengan kualitas data, yang mencakup keandalan, konsistensi, dan relevansi. Data yang akurat adalah data yang bebas dari kesalahan dan bias, sehingga dapat digunakan untuk analisis yang valid. Dengan demikian, akurasi data menjadi elemen kunci dalam memastikan kualitas dan keandalan informasi yang digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai wadah pengelolaan keuangan negara, yang mencakup pendapatan dan belanja, guna membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan. Setiap tahun, APBN ditetapkan melalui undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (MKRI, 2025).

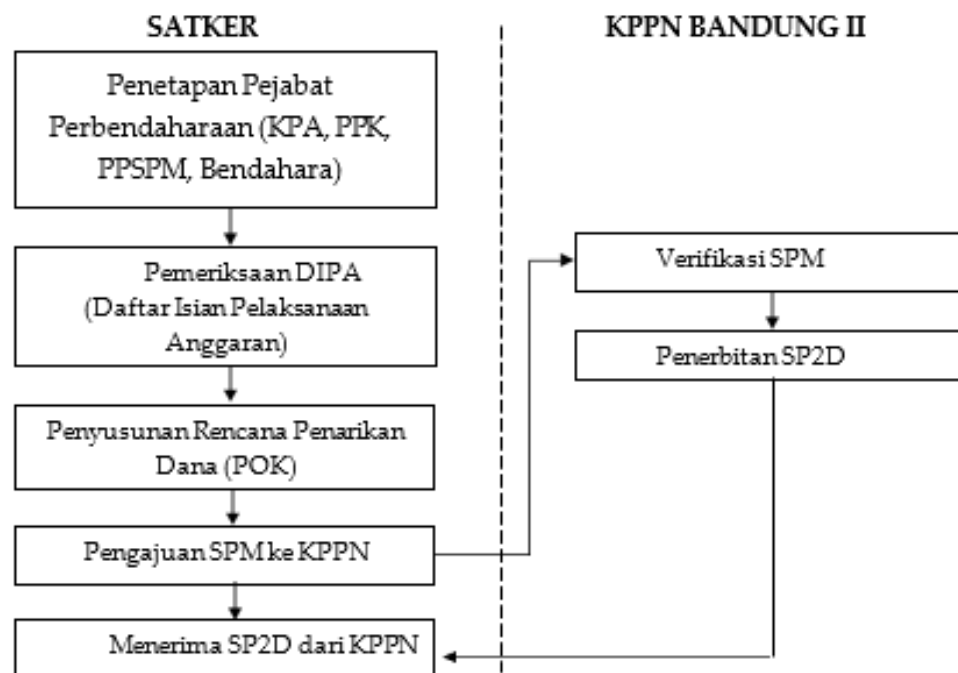
Dalam kerangka satu tahun anggaran, APBN mencakup tiga komponen utama yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah pusat. Pertama, hak pemerintah yang menambah nilai aset bersih. Kedua, kewajiban pemerintah yang mengurangi nilai aset bersih. Ketiga, transaksi keuangan yang memerlukan pengembalian atau penerimaan di masa mendatang, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya (Keuangan B. P., 2024). Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN mengemban beragam peran penting. Peran-peran ini mencakup pengalokasian sumber daya, pendistribusian kekayaan, pemeliharaan stabilitas ekonomi, pelaksanaan regulasi, pengawasan penggunaan dana, dan pemberian otorisasi untuk tindakan keuangan.

Pencairan Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pencairan dana didefinisikan sebagai proses mengeluarkan atau merealisasikan dana. Hal ini mencakup kegiatan menguangkan dana dan memberikan izin untuk pengambilan uang tunai yang dialokasikan untuk suatu keperluan. Sedangkan Najlah (2024) mengemukakan bahwa pencairan dana merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh KPPN untuk menyediakan dana kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau mitra. Pembayaran langsung dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas anggaran, atau yang diberi wewenang, dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang valid. Proses ini meliputi dua kategori utama, yaitu beban pegawai seperti (gaji, tunjangan, honorarium, dan lembur) dan beban non pegawai yang meliputi pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran biaya utilitas seperti (listrik, telepon, dan air) .

Gaji Induk

Gaji Induk adalah kompensasi bulanan yang diberikan secara teratur kepada pegawai di suatu unit kerja. Pembayaran ini mencakup berbagai elemen pendapatan, seperti gaji pokok, tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, dan komponen lainnya. Proses pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening bank masing-masing pegawai melalui sistem transfer elektronik. (Kemenkeu, 2020).



Gambar 1.1 Alur Pencairan Gaji Melalui KPPN

Proses ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai pada Satuan Kerja Tentara Nasional Indonesia.

Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara DJPb Kemenkeu dan BKN, Aplikasi Gaji KPPN Terpusat adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan basis data tunggal (single database) yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses pengujian (BKN, 2021). Dalam proses rekonsiliasi, aplikasi ini membandingkan database dengan data yang dihasilkan oleh Aplikasi Gaji Satker Terpusat pada satuan kerja untuk menguji validitas data pembayaran gaji bulan yang dituju.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022), metode kualitatif deskriptif didasarkan pada paradigma *post-positivisme* dan digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alamiah. Peneliti memilih metode ini untuk menganalisis tingkat akurasi dan efisiensi penerapan Aplikasi Gaji KPPN dalam penyaluran gaji induk yang bersumber dari APBN, serta membandingkannya dengan sistem manual dan mengidentifikasi kendala yang muncul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi dan Akurasi Penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

Efisiensi penggunaan aplikasi teknologi informasi dapat diukur dari kemampuannya untuk mengurangi pemborosan sumber daya, mempercepat proses, dan mengurangi kesalahan manusia. Efisiensi aplikasi terkait erat dengan kemampuan sistem untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi ketergantungan pada intervensi manual, dan mengoptimalkan waktu serta biaya operasional. Efisiensi ini dapat dilihat dalam peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional yang terjadi akibat penggunaan aplikasi yang tepat.

Dalam Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, efisiensi yang signifikan tercapai dalam proses pencairan gaji induk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil wawancara, proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan cepat dan akurat, jika terjadi keterlambatan pun disebabkan oleh kesalahan SPM atau ketidaksempurnaan data yang diunggah oleh satker. Minimnya intervensi manual menjadi keunggulan sistem ini, keterlambatan umumnya disebabkan oleh kesalahan input dari satuan kerja (satker), bukan dari

aplikasi itu sendiri. Selain itu, kemudahan verifikasi data juga turut mempermudah proses pengecekan oleh pegawai KPPN karena sistem ini sudah terotomasi untuk mendeteksi kesalahan. Akurasi data juga dalam sistem penggajian merupakan faktor krusial untuk memastikan bahwa setiap pegawai menerima hak secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rizki Muharam Sururi (2022), sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki keakuratan data yang tinggi untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, keakuratan ini dicapai melalui sistem validasi otomatis yang langsung menolak data yang tidak sesuai, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembayaran gaji. Selain itu, keakuratan dalam perhitungan gaji dijamin dengan adanya integrasi sistem terhadap berbagai komponen gaji, termasuk tunjangan, potongan, dan pajak.

Implementasi Aplikasi Gaji KPPN Terpusat telah meningkatkan akurasi penyaluran gaji pada KPPN Bandung II. Hal ini tercermin dari angka realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 senilai Rp6,64 T dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6,68 T. Dengan kata lain, realisasi Belanja Pegawai lingkup KPPN Bandung II tahun 2024 mencapai 99,44% atau hampir 100%.

Tabel 1.1

Realisasi Penyaluran Dana KPPN Bandung II Tahun 2024

Kategori Belanja	Realisasi	Presentase
Belanja Pegawai	6,64 T	99,44%
Belanja Barang	5,89 T	92,46%
Belanja Modal	4,47 T	92,95%
Belanja Sosial	30,82 M	99,99%
Transfer Ke Daerah	7,36 T	98,92%

Sumber: Data Internal KPPN Bandung II

Dengan tingkat akurasi yang tinggi ini, KPPN Bandung II dapat memastikan bahwa alokasi dana APBN yang dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai tersalurkan dengan efisien dan tepat waktu.

Perbandingan Penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat Dengan Sistem Manual

Dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan, Aplikasi Gaji KPPN Terpusat membawa perubahan signifikan dalam hal efisiensi dan akurasi. Sebelum adanya sistem ini, banyak proses dilakukan secara manual, yang meningkatkan potensi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pemrosesan data. Sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan

manual yang berisiko tinggi terhadap kesalahan. Kecepatan pemrosesan data juga meningkat dengan adanya sistem otomatisasi. Namun, efisiensi sistem ini tetap bergantung pada ketepatan waktu pengajuan dari Satker. Jika pengajuan dilakukan sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan, pembayaran gaji akan dilakukan tepat waktu penyelesaian keluhan pegawai.

Sebaliknya, keterlambatan pengajuan oleh Satker dapat menyebabkan perubahan status pembayaran menjadi gaji susulan, yang berarti pencairan gaji dilakukan setelah tanggal 1. Kondisi ini dapat berdampak pada kepuasan satuan kerja.

Tabel 1.2

Matriks Perbandingan Penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat Dengan

Aspek	Sistem Manual	Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
Kecepatan Pemrosesan Data	Lambat, banyak sekali tahapan	Cepat, otomatitasi proses data
Potensi Kesalahan	Cukup tinggi, rentan <i>human error</i>	Rendah, validasi sistem otomatis
Keterlambatan Gaji	Sering terjadi	Jarang terjadi, lebih tepat waktu
Beban Administratif	Tinggi, membutuhkan banyak dokumen fisik	Rendah, pengelolaan dokumen elektronik

Sistem Manual

Sumber: Data diolah peneliti

Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

Meskipun Aplikasi Gaji KPPN Terpusat telah memberikan banyak manfaat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya salah satunya adalah keterlambatan dari Satker dalam mengajukan dokumen yang lengkap, yang menyebabkan keterlambatan dalam pencairan gaji. (Kemenkeu, Penerimaan Sistem Informasi E-Katalog V6, 2025) menjelaskan bahwa efektivitas sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi Satker dalam mengelola data gaji sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini.

Selain kendala teknis, tingkat responsivitas dalam menangani pengaduan. Saat ini, sistem pengaduan di KPPN telah dilengkapi dengan Customer Service Officer (CSO) yang bertugas menangani keluhan terkait gaji. Responsivitas ini sangat penting dalam menjaga kepuasan pegawai, sebagaimana dikemukakan oleh Tjiptono et al. (2019) dalam model SERVQUAL yang menyebutkan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam menangani keluhan pelanggan (dalam hal ini satuan kerja) berkontribusi terhadap persepsi kualitas layanan yang diberikan. Namun, pengaduan yang dilakukan melalui platform digital seperti WhatsApp atau Hi CSO terkadang mengalami keterlambatan dalam respons, terutama jika jumlah pengaduan sedang tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital perlu dilakukan untuk meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat telah membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi dan akurasi penyaluran gaji pegawai di KPPN Bandung II. Efisiensi dicapai melalui proses otomatis yang meminimalkan intervensi manual, mempercepat rekonsiliasi data, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Sistem akurasi semakin terjamin dengan adanya validasi otomatis yang memastikan ketepatan dalam perhitungan dan pencatatan gaji. Hal ini terbukti dari tingkat realisasi belanja pegawai yang mencapai 99,44% dari total anggaran yang dipilih.

Dibandingkan dengan sistem manual, Aplikasi Gaji KPPN Terpusat mampu mengoptimalkan kecepatan pemrosesan data, mengurangi keterlambatan pembayaran gaji, serta menurunkan beban administrasi melalui pengelolaan dokumen secara elektronik. Namun kendala utama yang masih dihadapi adalah keterlambatan satuan kerja (Satker) dalam pengajuan dokumen yang lengkap, yang berdampak pada keterlambatan pencairan gaji. Selain itu, sistem tanggung jawab pengaduan pegawai masih perlu ditingkatkan untuk menjamin pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi Satker serta optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penggunaan aplikasi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anisyah, A. A. (2024). Implementasi sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 28–38.
- Atmaja, A., Santoso, J., & Ninghardjanti, P. (2018). Penerapan sistem otomatisasi administrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di bidang pendapatan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 2(2).
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2021). Rekonsiliasi data aparatur sipil negara antara aplikasi gaji KPPN terpusat dengan aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara. Peraturan Perbendaharaan 2021–Nomor: PRJ 309/PB/2021. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2024, November 18). APBN dalam satu anggaran. <https://sulbar.bpk.go.id/?p=30891>
- Cholik, H. D. (2024). Evaluasi pemberlakuan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam rangka mendukung pertanggungjawaban di satuan kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri–Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(1), 9–21.
- Deasy Arisandi, R. S. (2024). Efektivitas aplikasi sistem informasi manajemen gaji aparatur sipil negara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1).
- Gultom, D. N., & Kusuma, E. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012, November 29). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127001/pmk-no-190pmk052012>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016, January 29). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/11-pmk-05-2016>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, September 12). Panduan pencairan dana. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/panduan/panduan-pencairan-dana/3177-gaji-induk.html>
- Kirk, A. (2020). *Data visualization: A handbook for data driven design*. Sage Publications.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2025, January 30). Ringkasan perkara: Resume sidang pasal 23 ayat 1. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang Resume%20003PUU2003.pdf
- Najlah, A. N. (2024). Analisis prosedur pencairan dana langsung (LS) pada kantor pelayanan. *Cidea Journal*, 01–12.
- Stoner, J. A. F. (2010). *Manajemen*. PT Prenhallindo.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Alfabeta.

Sururi, R. M., & Alfi, C. A. (2022). Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan dengan penekanan security system pada PT Berkat Orang Muda. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 193–205.

Tjiptono, F. (2015). Pemasaran jasa. CV Andi Offset.

Tjiptono, F. (2019). Pemasaran jasa. Anggota IKAPI.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003.

Utari, R., & Putri, J. (2024). Analisis sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. *JUMIA: Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*.